UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Monika Suhayati

Peneliti Bidang Hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI
email: monika.suhayati@dpr.go.id.

Abstract

Funding is one of the main elements in the implementation of terrorist activities. Law on the Prevention and Eradication of Terrorism Financing governing eradicating terrorism by using the system and tracing the flow of funds mechanism (follow the money). Implementation of blocking the flow of terrorist funds and placement on the list of suspected terrorists and terrorist organizations which are regulated in the legislation is vulnerable to human rights violations. Indonesia as a rule of law state is obliged to give recognition and respect the human rights which guaranteed by law. Law on the Prevention and Eradication of Terrorism Financing has provided protection against human rights, namely the regulation on filing of an objection to the blocking of the flow of funds terrorism and placement on the list of suspected terrorists and terrorist organizations, the exception blocking the flow of terrorist funds, vindication and the rights for compensation and/or rehabilitation, and the establishment of the Central Jakarta District Court to do the blocking and the inclusion in the list of suspected terrorists.

Kata Kunci : terorisme, pendanaan, hak asasi manusia.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satu bentuk pelaksanaan tujuan nasional ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman aksi terorisme. Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup.¹ Rangkaian tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakibatkan

hilangnya nyawa tanpa memandang korban, ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda sehingga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Sebagai contoh, dampak tragedi bom Bali pada bulan Oktober 2002 telah menurunkan kegiatan ekonomi lokal sepanjang tahun 2003 dengan berkurangnya pendapatan penduduk Bali sekitar 43 persen, antara lain karena pemutusan hubungan kerja terhadap 29 persen tenaga kerja di Bali. Tragedi Bali juga berpengaruh dalam perekonomian nasional antara lain dengan menurunnya arus wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 30 persen. Dalam intensitas yang tinggi dan terus menerus, terorisme dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.²

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

² *Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme*, <http://www.bappenas.go.id/files/6213/5227/9358/bab-6-pencegahan-dan-penanggulangan-gerakan-terorisme.pdf>, diakses 18 Desember 2013.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam upaya pemberantasan tindak terorisme dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang pada 4 April 2003 (UU Pemberantasan Terorisme). Adapun salah satu aspek utama dalam setiap aksi terorisme adalah pendanaan kegiatan terorisme. Dalam pelaksanaan suatu aksi terorisme, dana sangat dibutuhkan antara lain untuk mempromosikan ideologi, membiayai anggota teroris dan keluarganya, mendanai perjalanan dan penginapan, merekrut dan melatih anggota baru, memalsukan identitas dan dokumen, membeli persenjataan, serta untuk merancang dan melaksanakan operasi. Oleh karena itu upaya penanggulangan tindak pidana terorisme tidak akan berhasil tanpa pemberantasan kegiatan pendanaannya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat hingga Maret 2010 sudah ditemukan 97 aliran dana ke teroris. Ketua PPATK Yunus Husein mengatakan berdasarkan penelusuran PPATK, 97 transaksi mencurigakan tersebut mengalir ke pihak yang diduga sebagai teroris. Transaksi tersebut dilakukan sejak 2003 melalui beberapa bank di Indonesia. Lebih lanjut Yunus Husein menyampaikan pihak yang diduga teroris tersebut biasanya melakukan penarikan dana antara Rp400 ribu hingga Rp5 juta setiap kali transaksi.³

Pengumpulan dana terorisme dilakukan juga melalui perampokan. Tim Densus 88 menjelaskan dana hasil rampokan (*fa'i*) kelompok teroris Abu Roban digunakan untuk membeli sejumlah senjata api, bahan peledak, dan membantu kelompok teroris Poso. Kelompok Abu Roban merupakan kelompok teroris pencari dana. Sejumlah aksi *fa'i* yang dilakukan kelompok Abu Roban yang berhasil dicatat diantaranya di Tangerang pada Februari

2013 merampok toko bangunan baja dan besi Terus Jaya di Pondok Ranji Tangerang dengan hasil Rp30 juta. Pada Desember 2012 mereka merampok toko *handphone* di Bintaro hasilnya 100 buah *handphone*. Kemudian pada 22 April 2013 di Bank BRI Lampung Gading Rejo berhasil menggask uang Rp 466.700.000,-.⁴

Dana hasil rampokan kelompok Abu Roban yang mencapai Rp1,8 miliar lebih dipakai untuk pembelian senjata api sebanyak 21 pucuk dengan total uang yang dikeluarkan Rp 440.400.000,-. Senjata api yang dibeli diantaranya revolver 9 pucuk, FN 11 pucuk, Laras panjang (M1 US Carraben) satu pucuk, amunisi 1905 butir yang terdiri dari peluru FN 400 butir, revolver 505 butir, kaliber 5,56 mm 900 butir, peluru untuk M1 US Carraben 100 butir. Kemudian sebagian uangnya digunakan untuk pembelian bahan pembuatan bom dan untuk kesejahteraan keluarga anggota kelompok Abu Roban di masing-masing wilayah.⁵

Dalam rangka pemberantasan pendanaan kegiatan terorisme, Indonesia telah meratifikasi *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999) pada 5 April 2006. Ratifikasi Konvensi Pemberantasan Pendanaan Terorisme merupakan pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1373. Resolusi tersebut meminta setiap negara anggota untuk mengambil langkah pemberantasan terorisme, termasuk meratifikasi 12 (dua belas) konvensi internasional mengenai terorisme.

Pada 13 Maret 2013, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme). Rancangan Undang-

³ Dana Teroris Ditransfer dari Bank Besar, <http://www.hariansumutpos.com/arsip/?p=36576>, diakses 3 Desember 2012.

⁴ Ini Aliran Dana Hasil Rampokan Kelompok Teroris Abu Roban, <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/05/15/ini-aliran-dana-hasil-rampokan-kelompok-teroris-abu-roban>, diakses 18 Desember 2013.

⁵ *Ibid.*

Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme merupakan usul inisiatif Pemerintah yang terdapat dalam Program Legislasi Nasional DPR Tahun 2009-2014 dan merupakan Prolegnas Prioritas pada tahun 2012 dan 2013.

UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme mengatur beberapa substansi yang rentan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, *pertama* mengenai pemblokiran aliran dana terorisme. Pemblokiran ini dilakukan terhadap dana yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian, untuk Tindak Pidana Terorisme.⁶ Pemblokiran dilakukan oleh PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan meminta atau memerintahkan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) atau instansi berwenang untuk melakukan pemblokiran.⁷ Pemblokiran dilakukan dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta atau memerintahkan PJK atau instansi berwenang untuk melakukan Pemblokiran.⁸

Substansi berikutnya yang rentan pelanggaran hak asasi manusia yaitu mengenai daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan pencantuman identitas orang atau korporasi ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan menetapkan permohonan tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Jika dalam pemeriksaan alasan, dokumen, dan/atau rekomendasi yang diajukan dapat dijadikan dasar untuk mencantumkan identitas orang atau korporasi ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat segera menetapkan identitas orang atau korporasi tersebut sebagai terduga teroris dan organisasi teroris.⁹

⁶ Pasal 22 UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme.

⁷ Pasal 23 ayat (1) UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme.

⁸ Pasal 23 ayat (2) UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme.

⁹ Pasal 27 UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme.

B. Rumusan Masalah

Salah satu pertimbangan pembentukan UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme adalah peratifikasian Konvensi Pemberantasan Pendanaan Terorisme oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2006 mewajibkan Indonesia membuat atau menyetarakan peraturan perundang-undangan terkait dengan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam konvensi. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme belum mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme secara memadai dan komprehensif. Adapun UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme tersebut mengatur substansi yang rentan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yaitu pengaturan mengenai pemblokiran aliran dana terorisme dan daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Permasalahan ini menarik minat Penulis untuk membuat suatu kajian dengan mengangkat pokok permasalahan yaitu bagaimana UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme dari perspektif hak asasi manusia.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

A. Konsep Pendanaan Terorisme

Pelaku terorisme tidak akan pernah berhasil melakukan aksinya tanpa adanya berbagai bentuk fasilitas dan instrumen pendukung lainnya, salah satunya adalah dukungan pendanaan. Dalam kegiatan terorisme, dana sangat dibutuhkan untuk mempromosikan ideologi, membiayai anggota teroris dan keluarganya, mendanai perjalanan dan penginapan, merekrut dan melatih anggota baru, memalsukan identitas dan dokumen, membeli persenjataan, dan untuk merancang dan melaksanakan operasi. Pendanaan terorisme bisa bersumber dari aktivitas ilegal seperti penculikan, perampokan, pembajakan, narkoba, barter/*trading* atau hasil dari bisnis yang legal yang dimiliki/dijalankan teroris, donasi ke yayasan atau LSM, *hawala*, *internet banking*, *cash couriers*.

Pendanaan Terorisme berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan,

atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Pengertian dana berdasarkan Pasal 1 angka 7 adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, *bank draft*, dan surat pengakuan utang.

Tindak pidana pendanaan terorisme dirumuskan oleh UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 4 UU Pendanaan Terorisme).
- b. Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Pasal 5 UU Pendanaan Terorisme).
- c. Setiap orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling lama 20 (dua puluh) tahun (Pasal 6 UU Pendanaan Terorisme).

Lembaga pengawas dan pengatur dalam rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme yaitu¹⁰:

- a. Bank Indonesia
Merupakan pengawas industri perbankan (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, pedagang valuta asing, dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU).
- b. BAPEPAM-LK
Merupakan pengawas di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal, antara lain Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Kustodian.
- c. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Merupakan regulator/pengawas penyelenggaraan pos.
- d. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bapebti)
Merupakan regulator/pengawas perdagangan berjangka komoditi.
- e. Direktorat Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- f. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Merupakan bagian dari rezim pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan pelaporan *Cross Border Cash Carrying* (CBCC).

B. Teori Negara *Rule of Law*

Konsep negara *rule of law* merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Istilah "*rule of law*" dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai "supremasi hukum" (*supremacy of law*) atau pemerintahan berdasarkan hukum (*government by law*) atau negara hukum (*rechtstaat*). Pengakuan suatu negara sebagai

¹⁰ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Jakarta: PPAATK, 2011, hal. 44-46.

negara hukum sangat penting karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas (tidak absolut). Perlu pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Dalam negara hukum, pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas, tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Karena itu dalam negara hukum, hukum memainkan peranan yang sangat penting dan berada diatas kekuasaan negara dan politik.¹¹

Menurut Munir Fuady, yang dimaksudkan dengan negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu kontribusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar perbedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.¹²

Menurut Hans Kelsen, sebagaimana dikutip oleh M. Hatta, salah satu syarat untuk disebut sebagai negara hukum antara lain dengan ditegakkannya hak asasi manusia.¹³ Unsur-unsur negara hukum (*rechtstaat*) menurut Julius Stahl yaitu adanya pengakuan hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan dan adanya

peradilan tata usaha negara.¹⁴ Menurut Dicey, terdapat tiga unsur dari *rule of law* yaitu¹⁵:

1. Supremasi absolut ada pada hukum, bukan pada tindakan kebijaksanaan atau prerogative penguasa.
2. Berlakunya prinsip persamaan dalam hukum (*equality before the law*), dimana semua orang harus tunduk kepada hukum dan tidak seorang pun yang berada di atas hukum (*above the law*).
3. Konstitusi merupakan dasar dari segala hukum bagi negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, hukum yang berdasarkan konstitusi harus melarang setiap pelanggaran terhadap hak dan kemerdekaan rakyat.

D. Konsep Hak Asasi Manusia

*Human rights are, literally, the rights that one has simply because one is a human being.*¹⁶ Kutipan ini berarti hak asasi manusia di samping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami, dan ditanggjawab untuk dilaksanakan. Hak asasi merupakan suatu perangkat asas yang timbul dari nilai yang kemudian menjadi kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Apapun yang diartikan atau dirumuskan dengan hak asasi, gejala tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah hidup bersama.¹⁷

Sebagai hak kodrati, hak asasi melebur dalam jati diri manusia sehingga tidak dibenarkan siapa pun mencabut hak asasi tersebut. Dengan kata lain, moralitas hak asasi

¹¹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hal. 1-2.

¹² *Ibid.*, hal. 3.

¹³ A. Masyhur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1993, hal. 32.

¹⁴ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal. 42.

¹⁵ ECS Wede dan A. W. Bradley, *Constitutional and Administrative Law*, London: Longman House, 1985, hal. 94 dalam Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hal. 3-4.

¹⁶ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca: Cornell University Press, 2003, hal. 10 dalam Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hal. 15.

¹⁷ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hal. 15.

manusia adalah *to affirm the two fold claim that each and every (born) human beings has inherent dignity and is inviolable (not-to be-violated)* sebagaimana disampaikan oleh Michael J. Perry.¹⁸ Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Hak asasi manusia tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia tanpa kecuali. Hak asasi manusia melekat pada setiap manusia melalui seperangkat aturan hukum yang ada. Penegakan hukum hak asasi manusia selalu berhadapan dengan beragam kondisi yang ada. Peran pemerintah menjadi mutlak dalam hal ini karena hukum adalah sesuatu atau norma yang diam dan lemah. Hukum hanya dapat bergerak dan hanya dapat digerakkan oleh penguasa atau *the strong arms* agar hukum dapat berjalan dan efektif.¹⁹

Pengakuan hak asasi manusia telah dinyatakan secara internasional dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Penjabaran dari hak dan kebebasan dasar dalam UDHR kemudian dituangkan dalam *International Convention on Civil and Politic Rights* (ICCPR). Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) pada 28 Oktober 2005. PBB mendefinisikan hak asasi

manusia sebagai *“those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings. Human rights have also be defined as moral rights of the higher order temming from socially shared moral conceptions of the nature of the human person and the condition necessary for a life of dignity.”*²⁰

Indonesia sebagai negara hukum telah memasukkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ke dalam konstitusinya, yaitu dalam Bab XA UUD 1945. Pasal 28I UUD 1945 menyatakan pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pasal 2 UU HAM menyatakan:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Pengertian hak asasi manusia berdasarkan UU HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 ayat (1) UU HAM).

III. ANALISIS

Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme sebelum adanya UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme dilakukan secara konvensional *follow the suspect*, yakni dengan menghukum para pelaku tindak pidana terorisme. UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme mengatur upaya lain dalam pemberantasan tindak pidana terorisme yaitu dengan menggunakan sistem dan mekanisme

¹⁸ Michael J. Perry, *Toward a Theory of Human Rights; Religion, Law, Courts*, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, hal. 33 dalam Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hal. 15.

¹⁹ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM)*, hal. 32-33.

²⁰ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal. 47.

penelusuran aliran dana (*follow the money*) karena tindak pidana terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung oleh tersedianya dana untuk kegiatan terorisme tersebut. Upaya ini melibatkan penyedia jasa keuangan, aparat penegak hukum, dan kerjasama internasional untuk mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme.

Pendanaan terorisme menjadi sangat berbahaya dibandingkan bentuk kriminal lainnya dikarenakan strategi dalam menggunakan organisasi amal atau nirlaba sebagai sumber pendanaan dan kemampuannya menginfiltrasi sistem keuangan negara-negara miskin dan berkembang. Selain itu, sumber dana terorisme yang dapat berasal dari sumber halal atau legal semakin mempersulit penelusuran dan pembuktian aliran dana terorisme. Pemalsuan identitas juga mudah dilakukan karena semakin menjamurnya *e-business* dan kemudahan transaksi keuangan *via* internet di era globalisasi.

Hampir seluruh negara di dunia, terutama negara maju telah menerapkan legislasi anti pendanaan terorisme di negaranya. Di tingkat internasional, *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penerapan regulasi *Anti Money Laundering* (AML) dan *Counter Financing Terrorism* (CFT). Berkaitan dengan pelaksanaan *Anti Money Laundering* dan *Counter Financing Terrorism* di Indonesia, FATF dalam *Public Statement 22 June 2012* menyatakan:

“Indonesia is continuing to improve its AML/CFT regime since the enactment of its AML legislation in 2010 and by introducing CFT legislation in Parliament for committee discussion. However, despite Indonesia’s high-level political commitment to work with the FATF and APG to address its strategic AML/CFT deficiencies, Indonesia has not made sufficient progress in implementing its action plan, and certain strategic AML/CFT deficiencies remain. Indonesia should continue to work on implementing its action plan to address these deficiencies, including by: (1) adequately criminalising terrorist financing; (2) establishing and implementing adequate procedures to identify

and freeze terrorist assets; and (3) amending and implementing laws or other instruments to fully implement the 1999 International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism. The FATF encourages Indonesia to address its remaining deficiencies and continue the process of implementing its action plan”.²¹

A. Pemblokiran Aliran Dana Terorisme

Substansi pertama dalam UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme yang rentan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yaitu pemblokiran aliran dana terorisme. Pemblokiran tersebut dilakukan terhadap dana yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian, untuk Tindak Pidana Terorisme. Pemblokiran dilakukan oleh PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan meminta atau memerintahkan PJK atau instansi berwenang untuk melakukan pemblokiran. Pemblokiran dilakukan dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta atau memerintahkan PJK atau instansi berwenang untuk melakukan pemblokiran. Khusus untuk permintaan PPATK ke PJK atau instansi berwenang untuk melakukan pemblokiran merupakan tindakan administrasi. Pemblokiran dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal jangka waktu pemblokiran ini berakhir, PJK wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum. Dana yang diblokir harus tetap berada pada PJK atau instansi berwenang yang bersangkutan.²²

Permintaan PPATK atau perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

- a. nama dan jabatan pejabat yang meminta atau memerintahkan;
- b. identitas orang atau korporasi yang dananya akan diblokir;

²¹ FATF *Public Statement-22 June 2012*, <http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatfpublicstatement-22june2012.html>, diakses 25 September 2012.

²² Diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme.

- c. alasan pemblokiran; dan
- d. tempat dana berada.

PJK atau instansi berwenang wajib melaksanakan pemblokiran segera setelah surat permintaan atau perintah pemblokiran diterima dari PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan menggunakan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran, PJK atau instansi berwenang wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim dan pihak yang diblokir.²³

Pemblokiran dapat dilakukan secara serta merta terhadap dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Proses pemblokiran serta merta sebagai berikut:

- 1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan daftar terduga teroris dan organisasi teroris serta setiap perubahannya ke instansi pemerintah terkait dan LPP untuk selanjutnya disampaikan ke PJK dan instansi berwenang.
- 2) Penyampaian daftar terduga teroris dan organisasi teroris disertai permintaan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau korporasi.
- 3) PJK atau instansi berwenang wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau korporasi berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 4) PJK atau instansi berwenang membuat berita acara pemblokiran dan wajib menyampaikannya kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Pemblokiran berlaku selama identitas orang atau korporasi masih tercantum

dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.²⁴

B. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang Dikeluarkan oleh Pemerintah

Substansi kedua yang rentan pelanggaran hak asasi manusia yaitu adanya daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Prosedur pencantuman identitas orang atau korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai berikut:

- 1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan pencantuman identitas orang atau korporasi ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
- 2) Dalam mengajukan permohonan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyertakan:
 - a. identitas orang atau korporasi yang akan dicantumkan dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris;
 - b. alasan permohonan berdasarkan informasi yang diperoleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dari instansi pemerintah terkait;
 - c. Dokumen yang menunjukkan bahwa orang atau korporasi tersebut diduga telah melakukan atau mencoba melakukan, atau ikut serta, dan/atau memudahkan suatu Tindak Pidana Terorisisme; dan
 - d. rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dalam hal dokumen berasal dari negara, organisasi internasional, dan/atau subjek hukum internasional lain.
- 3) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan menetapkan permohonan tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut.

²³ Diatur dalam Pasal 23 UU Pemberantasan Pendanaan Terorisisme.

²⁴ Diatur dalam Pasal 28 UU Pemberantasan Pendanaan Terorisisme.

- 4) Jika dalam pemeriksaan alasan, dokumen, dan/atau rekomendasi yang diajukan dapat dijadikan dasar untuk mencantumkan identitas orang atau Korporasi ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat segera menetapkan identitas orang atau korporasi tersebut sebagai terduga teroris dan organisasi teroris.
- 5) Setelah memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia segera mencantumkan identitas orang atau korporasi ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
- 6) Daftar terduga teroris dan organisasi teroris dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 7) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan daftar terduga teroris dan organisasi teroris secara tertulis kepada orang atau korporasi dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
- 8) Apabila pencantuman identitas orang atau Korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris melampaui 6 (enam) bulan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengajukan permohonan perpanjangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perpanjangan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 3 (tiga) bulan.²⁵

C. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme

Pemberantasan kegiatan pendanaan terorisme memiliki kaitan yang erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Dalam *International Best Practices Targeted Financial Sanctions Related to Terrorism and Terrorist Financing (Recommendation 6)*, FATF menyatakan:

Efforts to combat terrorist financing are greatly undermined if countries do not freeze the funds or other assets of designated persons and entities quickly and effectively. Nevertheless, in determining the limits of or fostering widespread

²⁵ Diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 31 UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme.

*support for an effective counter-terrorist financing regime, countries must respect human rights, respect the rule of law, allow due process, recognise and protect the rights of bona fide third parties.*²⁶

Demikian pula Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana teori negara hukum (*Rule of law*) yang diungkapkan oleh Hans Kelsen, Julius Stahl dan A. V. Dicey yang menyatakan salah satu syarat atau unsur negara hukum adalah adanya pengakuan hak asasi manusia yang dijamin melalui undang-undang. Indonesia telah mengakui dan memberikan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 dan UU HAM. Indonesia juga telah meratifikasi perjanjian internasional ICCPR yang merupakan penjabaran hak asasi manusia yang terdapat dalam UDHR.

Pengaturan mengenai pemblokiran aliran dana terorisme dan daftar terduga teroris dan organisasi teroris di Indonesia dalam UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme merupakan upaya negara dalam rangka melindungi warga negaranya terhadap segala bentuk ancaman terorisme yang mengganggu rasa aman dan mengganggu kedaulatan negara. Pengaturan ini dimungkinkan dimana konstitusi Indonesia memberikan pembatasan dalam menjalankan hak dan kebebasan warga negaranya dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam pelaksanaannya, pemblokiran dana dan penempatan dalam daftar terduga teroris atau organisasi teroris rentan melanggar hak asasi yang dimiliki setiap warga negara

²⁶ FATF, *International Best Practices Targeted Financial Sanctions Related to Terrorism and Terrorist Financing (Recommendation 6)*, Paris: FATF/OECD, 2013, hal. 5.

sebagaimana telah diatur oleh konstitusi. Hak asasi yang rentan dilanggar antara lain hak untuk hidup. Hak untuk hidup diatur dalam Pasal 28A UUD Tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dengan dicantumkan dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, terduga teroris dapat kehilangan hak untuk hidup. Hal ini terjadi antara lain pada saat baku tembak antara anggota Detasemen Khusus 88 Anti-teror Kepolisian Republik Indonesia dengan kelompok terduga teroris di Tangerang Selatan, Banten, yang mengakibatkan enam terduga teroris tewas, sementara satu orang lainnya ditangkap. Baku tembak terjadi selama sembilan jam di sebuah rumah kontrakan di Jl. KH Dewantoro, Kampung Sawah, Ciputat.²⁷

Menanggapi penembakan terduga teroris tersebut, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, tidak semestinya para terduga teroris itu ditembak mati semua. Menangkap para terduga dengan cara hidup, tentu akan lebih bermanfaat bagi Polri. Priyo Budi Santoso, persoalan berulang ini semestinya menjadi pelajaran Polri mendatang. Semua penegak hukum juga harus menghargai hak hidup semua orang. Kedua, menangkap para terduga teroris tersebut dengan cara hidup, juga akan memberi sudut pandang baru terkait pergerakan kelompok berbahaya ini.²⁸

Hak asasi berikutnya yang rentan dilanggar yaitu hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya (Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945). Pencantuman dalam daftar terduga teroris mengakibatkan orang atau organisasi mendapat sebutan sebagai terduga teroris sehingga kehilangan hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat. Demikian pula dengan dilakukannya

pemblokiran terhadap dana seseorang maka orang tersebut kehilangan hak perlindungan atas harta benda yang dimilikinya. Orang tersebut hanya dapat menggunakan sebagian dari harta bendanya antara lain untuk keperluan makan sehari-hari orang yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris beserta keluarganya dan tanggungannya. Pengecualian pemblokiran dana ini diatur dalam Pasal 34 UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme.

Menurut *Officer for Democratic Institutions and Human Rights*, penempatan seseorang atau organisasi dalam daftar terduga teroris atau organisasi teroris melanggar hak asasi manusia antara lain hak atas privasi (*the right to privacy*), hak milik (*the right to property*), hak berserikat (*the right of association*), dan hak untuk bepergian atau kebebasan bergerak (*the right to travel or freedom of movement*).²⁹

Berkaitan dengan daftar terduga teroris yang dikeluarkan oleh PBB, dalam laporan bulan Maret 2007 *United Nations High Commissioner for Human Rights* menyatakan:

While the system of targeted sanctions represents an important improvement over the former system of comprehensive sanctions, it nonetheless continues to pose a number of serious human rights concerns related to the lack of transparency and due process in listing and delisting procedures. In brief, they include questions related to:

- *Respect for due process rights: Individuals affected by a United Nations listing procedure effectively are essentially denied the right to a fair hearing;*
- *Standards of proof and evidence in listing procedures: While targeted sanctions against individuals clearly have a punitive character, there is no uniformity in relation to evidentiary standards and procedures;*
- *Notification: Member States are responsible for informing their nationals that they have been listed, but often this*

²⁷ 6 *Terduga Teroris Tewas dalam Baku Tembak dengan Densus 88*, <http://www.voaindonesia.com/content/enam-teroris-tewas-dalam-baku-tembak-dengan-densus-88/1821232.html>, diakses 30 Januari 2014.

²⁸ DPR Minta Kapolri Hentikan Tren Tembak Mati Terduga Teroris, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/01/04/myvbho-dpr-minta-kapolri-hentikan-tren-tembak-mati-terduga-teroris>, diakses 30 Januari 2014.

²⁹ Officer for Democratic Institutions and Human Rights, *Combating the Financing of Terrorism While Protecting Human Rights: A Dilemma?*, Background Paper Giessbach II Seminar on Combating the Financing of Terrorism, Davos, Switzerland, October 2008, hal. 9.

does not happen. Individuals have a right to know the reasons behind a listing decision, as well as the procedures available for challenging a decision;

- Time period of individual sanctions: Individual listings normally do not include an “end date” to the listing, which may result in a temporary freeze of assets becoming permanent. The longer an individual is on a list, the more punitive the effect will be;
- Accessibility: Only States have standing in the current United Nations sanctions regime, which assumes that the State will act on behalf of the individual. In practice, often this does not happen and individuals are effectively excluded from a process which may have a direct punitive impact on them; and
- Remedies: There is a lack of consideration to remedies available to individuals whose human rights have been violated in the sanctions process.³⁰

Dalam kutipan diatas, *United Nations High Commissioner for Human Rights* mengungkapkan permasalahan serius terkait dengan hak asasi manusia karena kurangnya transparansi serta adanya masalah hukum terkait dengan prosedur *listing* dan *delisting*. *Pertama*, hak atas proses hukum yang adil (*due process rights*). Individu yang terkena prosedur *listing* PBB pada dasarnya tidak berhak atas *fair hearing* yaitu kesempatan membela diri dan mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama dalam mengetahui, mengajukan berkas-berkas pembuktian dan memperoleh informasi. *Kedua*, standard bukti dan pembuktian dalam prosedur *listing*. Tidak ada keseragaman dalam kaitannya dengan standar dan prosedur pembuktian. *Ketiga*, notifikasi. Negara anggota PBB bertanggungjawab menginformasikan kepada warga negaranya bahwa mereka sudah tercantum dalam daftar, namun seringkali hal ini tidak terjadi. Setiap individu berhak mengetahui alasan ia diputuskan dimasukkan dalam daftar, juga prosedur yang tersedia dalam

mengajukan perlawanan terhadap sebuah keputusan.

Keempat, jangka waktu sanksi. Biasanya tidak ada batas akhir bagi individu-individu yang terkena *listing*, yang mungkin berdampak pada dibekukannya aset-asetnya secara permanen. Semakin lama seseorang terkena *listing*, efek menghukumnya (efek punitif) akan semakin besar. *Kelima*, aksesibilitas. Hanya negara yang dapat berfungsi sebagai pihak di PBB, yang diasumsikan bahwa negara akan bertindak atas nama individu itu. Dalam praktiknya, “keterwakilan” oleh negara ini seringkali tidak terjadi, dan individu yang terkena *listing* itu benar-benar dieksklusi dari suatu proses yang mungkin akan memiliki dampak punitif yang langsung baginya. *Keenam*, ganti rugi. Tidak ada pertimbangan ganti rugi bagi individu yang hak asasinya dilanggar dalam proses *listing*.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme telah memberikan pengaturan yang melindungi hak asasi manusia. *Pertama*, UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme mengatur mengenai pengajuan keberatan atas pemblokiran aliran dana terorisme. Pengajuan keberatan ini dapat dilakukan oleh setiap orang. Pasal 25 dan Pasal 26 UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme mengatur prosedur pengajuan keberatan sebagai berikut:

- 1) Pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan pemblokiran disampaikan kepada PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya pemblokiran.
- 2) Keberatan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan:
 - a. alasan yang mendasari keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan dana yang diblokir; dan
 - b. bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisasi yang menerangkan sumber dan latar belakang dana.

³⁰ *Ibid.*, hal. 7-8.

- 3) Dalam hal keberatan diterima, harus dilakukan pencabutan pelaksanaan pemblokiran oleh PJK atau instansi berwenang yang melakukan pemblokiran berdasarkan permintaan PPATK atau perintah dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- 4) Dalam hal keberatan ditolak, pihak yang mengajukan keberatan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
- 5) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemblokiran, PPATK atau penyidik menyerahkan penanganan dana yang diketahui atau patut diduga terkait Tindak Pidana Terorisme ke pengadilan negeri.
- 6) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkan:
 - a. terdapat pihak yang keberatan, pengadilan negeri melakukan pemeriksaan guna memutuskan dana dikembalikan kepada yang berhak atau dirampas untuk negara; dan/atau
 - b. tidak ada pihak yang keberatan, pengadilan negeri memutuskan dana dirampas untuk negara atau dimusnahkan.

Kedua, UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme memungkinkan pengajuan keberatan atas penempatan dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Keberatan ini dapat diajukan oleh setiap orang atau korporasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memperoleh penetapan tentang penghapusan identitasnya dari daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Permohonan tersebut harus disertai alasan yang memperkuat permohonan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian melakukan pemeriksaan terhadap keberatan secara terbuka dengan mempertimbangkan alasan dan bukti yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta alasan yang diajukan pemohon. Pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap keberatan dilakukan oleh hakim yang berbeda dengan hakim yang menetapkan daftar terduga

teroris dan organisasi teroris sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) UU Pemberantasan Pendanaan Teroris.³¹

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan yang menghapuskan atau mempertahankan identitas orang atau korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Terhadap penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pemohon atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Penetapan Pengadilan Tinggi Jakarta bersifat final.³²

Ketiga, pelaksanaan pemblokiran aliran dana terorisme dapat dikecualikan terhadap sebagian dari dana untuk pemenuhan kebutuhan orang atau korporasi yang diatur dalam Pasal 34 UU Pemberantasan Pendanaan Teroris, yang meliputi pengeluaran untuk keperluan makan sehari-hari orang yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris beserta keluarganya dan tanggungannya; biaya pengobatan atau perawatan medis orang yang tercantum beserta keluarganya; biaya pendidikan anak; biaya sewa untuk rumah tinggal; biaya hipotek; biaya premi asuransi; pembayaran pajak; biaya pelayanan publik; biaya terkait penyediaan jasa hukum; segala pembayaran yang berkaitan dengan kewajiban terhadap pihak ketiga yang timbul karena perikatan yang terjadi sebelum pencantuman identitas orang atau korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; dan/atau biaya administrasi rutin pemeliharaan dana yang diblokir. Pengecualian ini dimaksudkan agar orang atau korporasi yang terdaftar dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang dananya diblokir dapat tetap menggunakan sebagian dana yang diblokir untuk pemenuhan kebutuhannya.³³

Keempat, pemulihan nama baik dan hak untuk mendapatkan kompensasi dan/atau rehabilitasi dalam hal terdapat putusan pengadilan yang

³¹ Diatur dalam Pasal 32 UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme.

³² Diatur dalam Pasal 32 UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme.

³³ Diatur dalam Pasal 34 UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan penjelasannya.

telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa orang atau korporasi tersebut bebas dari segala tuntutan pidana yang terkait dengan suatu Tindak Pidana Terorisme atau tidak terdapat alasan bagi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tetap mempertahankan identitas orang atau Korporasi tersebut dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Hal ini dicantumkan dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai penghapusan identitas orang atau Korporasi.³⁴

Kelima, perlindungan hak asasi manusia juga diterapkan pada saat proses pemblokiran dana terorisme dan pencantuman seseorang atau organisasi teroris dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dimana pemblokiran dilakukan dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim maupun PJK atau instansi berwenang tidak dapat sewenang-wenang melakukan pemblokiran terhadap dana seseorang atau organisasi tanpa adanya penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Demikian pula pencantuman seseorang atau organisasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris harus menggunakan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Beberapa hal tersebut menunjukkan pengaturan mengenai pemblokiran dana aliran terorisme dan daftar terduga teroris dan organisasi teroris dalam UU Pemberantasan Pendanaan Teroris telah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme merupakan upaya pencapaian tujuan nasional membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan UUD Tahun 1945. Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui dan memberikan perlindungan hak

asasi manusia sebagaimana terdapat dalam UUD Tahun 1945 dan UU HAM. Adapun pengaturan mengenai pemblokiran aliran dana terorisme dan daftar terduga teroris dan organisasi teroris dalam UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme rentan untuk terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup (Pasal 28A UUD Tahun 1945) dan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya (Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945). Hal tersebut dimungkinkan di mana konstitusi Indonesia memberikan pembatasan dalam menjalankan hak dan kebebasan warga negaranya dengan pertimbangan keamanan (Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945).

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme telah memberikan pengaturan yang melindungi hak asasi manusia dengan adanya pengaturan mengenai pengajuan keberatan atas pemblokiran aliran dana terorisme, pengajuan keberatan atas penempatan dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, pengecualian pemblokiran aliran dana terorisme sebagian dari dana untuk pemenuhan kebutuhan orang atau korporasi, pemulihan nama baik dan hak untuk mendapatkan kompensasi dan/atau rehabilitasi, dan bentuk pengawasan di mana baik pemblokiran maupun pencantuman seseorang atau korporasi dalam daftar terduga teroris baru dapat dilakukan dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

B. Saran

UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme telah memberikan pengaturan pemblokiran aliran dana terorisme dan daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang melindungi hak asasi manusia. Adapun dalam pelaksanaan kedua kegiatan tersebut rentan melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu pelaksanaan pemblokiran aliran dana terorisme dan daftar terduga teroris dan organisasi teroris penting

³⁴ Diatur dalam Pasal 33 UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan penjelasannya.

dilaksanakan sesuai pengaturan dalam UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme sehingga tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Effendi, A. Masyhur. *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia, 1993.
- Effendi, A. Masyhur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- FATF. *International Best Practices Targeted Financial Sanctions Related To Terrorism And Terrorist Financing (Recommendation 6)*. Paris: FATF/OECD, 2013.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Muhtaj, Majda El. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*. Jakarta: PPATK, 2011.

Website

- “Dana Teroris Ditransfer dari Bank Besar”. <http://www.hariansumutpos.com/arsip/?p=36576>, diakses 3 Desember 2012.
- “DPR Minta Kapolri Hentikan Tren Tembak Mati Terduga Teroris”. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/01/04/myvbho-dpr-minta-kapolri-hentikan-tren-tembak-mati-terduga-teroris>, diakses 30 Januari 2014.
- “FATF Public Statement-22 June 2012”. <http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatfpublicstatement-22june2012.html>, diakses 25 September 2012.

“Ini Aliran Dana Hasil Rampokan Kelompok Teroris Abu Roban”. <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/05/15/ini-aliran-dana-hasil-rampokan-kelompok-teroris-abu-roban>, diakses 18 Desember 2013.

“Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme”. <http://www.bappenas.go.id/files/6213/5227/9358/bab-6-pencegahan-dan-penanggulangan-gerakan-terorisme.pdf>, diakses 18 Desember 2013.

“6 Terduga Teroris Tewas dalam Baku Tembak dengan Densus 88”. <http://www.voaindonesia.com/content/enam-teroris-tewas-dalam-baku-tembak-dengan-densus-88/1821232.html>, diakses 30 Januari 2014.

Makalah

Officer for Democratic Institutions and Human Rights. Combating the Financing of Terrorism. While Protecting Human Rights: A Dilemma?. Background Paper Giessbach II Seminar on Combating the Financing of Terrorism. Davos. Switzerland, 2008.

Peraturan Perundangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

_____. *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia.* UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

_____. *Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.* UU No. 9 Tahun 2013, LN No. 50 Tahun 2013, TLN No. 3886.

INDEKS

A

A Contrario, 201, 246
Administrasi, 163, 188, 189, 101, 192, 193, 222,
237, 242
Amar putusan, 201
Anthony Mason, 200
Argumentasi, 160, 218, 221
Arsyad Sanusi, 200, 213
Asuransi, 156, 160, 242

B

Badan Legislasi, 202, 203, 208
Bank Century, 158, 166
Bau, 187, 188, 189
Belanda, 187, 188, 216
Bikameral, *bicameralism*, bikameralisme, 200, 203
Broadcasting, 215, 217

C

Calon Tenaga Kerja Indonesia, 167, 169
Congruent/Incongruent Bicameralism, 200

D

Daftar terduga teroris dan organisasi teroris, 233,
238, 239, 240, 242, 243
Dana Pensiun, 156, 160
Dapat mengajukan RUU, 201, 203, 204, 212
Data pertanahan, 191, 194
Dewan Perwakilan Daerah, 184, 190, 195, 197, 198,
199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 213
Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, 153, 158, 166,
167, 169, 184, 197, 198, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
215, 216, 222, 224, 228, 230, 231, 232, 233,
240, 244
Diversity of Content, 218, 222
Diversity of Ownership, 218, 222, 223
Dokumen, 162, 164, 167, 169, 171, 177, 179, 180,
199, 232, 233, 238, 239, 241

E

Eksistensi, 223, 228, 235

F

Frekuensi, 216, 217, 218, 221, 222, 226, 229

G

Ganti rugi, 159, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193,
241

H

Hak Asasi Manusia, 154, 165, 173, 184, 200, 231,
233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243,
244, 245
Hak atas Fair Agreement, 163
Hak Atas Informasi, 149, 162, 163
Hak Konsumen, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 165
Hak untuk hidup, 231, 240, 243
Holding Company, 223
Hubungan kerja, 169, 171, 173, 175, 176, 231
Hubungan, 154, 159, 165, 168, 169, 171, 173, 175,
176, 179, 180, 182, 186, 188, 189, 190, 193,
203, 204, 205, 206, 210, 211, 217, 221, 224,
231, 235, 241
Hukum alam, 184, 189, 195
Hukum, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161,
162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
191, 192, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 204,
206, 208, 209, 210, 213, 215, 217, 218, 219,
220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229,
230, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241,
242, 243, 244

I

Ikut membahas RUU, 198, 204, 205, 206, 208, 211,
212
Interaksi, 185, 217
*International Convention for the Suppression of the
Financing of terrorism*, 232

- International Telecommunication Union, ITU, 217, 218
- Interpretasi, 199, 200, 206
- Isi Siaran, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229
- J**
- Jasa sektor keuangan, 161
- Judicial review*, 198, 220, 221, 230
- K**
- Kelembagaan, 156, 157, 194, 206, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 229, 246
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, 233, 238, 239, 242, 243
- Keputusan tata usaha Negara, 192
- Ketenagakerjaan, 155, 168, 169, 174, 175, 176, 179, 180
- Keterlibatan, 198, 203, 204, 205, 212
- Kewenangan, 155, 156, 157, 159, 160, 164, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 220, 221, 223, 224, 225, 228, 229, 235
- Kompensasi, 159, 164, 243
- Konstruksi Hukum, 164, 169, 173, 177
- KPI, 215, 216, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230
- L**
- Legislasi, 162, 169, 198, 201, 202, 203, 204, 207, 208, 211, 213, 216, 233, 237, 246
- Lembaga Penyiaran, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
- Lembaga, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 194, 197, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 234, 246
- Lex Specialis, 218
- Litera scripta*, 199
- LPB, 228
- LPK, 215, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 229
- LPP, 215, 220, 221, 222, 223, 225, 228, 229, 238
- LPS, 215, 220, 221, 222, 223, 226, 227, 228, 229
- Luar negeri, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 176, 178, 179, 180, 182, 238
- M**
- Mahkamah Konstitusi, MK, 155, 174, 197, 198, 199, 203, 213, 220
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, 155, 197, 213
- Mbah periok, 188, 240
- Mediasi, 161, 164, 184, 192, 193, 194, 195
- Memberikan pertimbangan, 198, 205, 207, 208, 210, 212
- N**
- Negara kesejahteraan, 154, 155, 165
- Negara, 153, 154, 155, 156, 158, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 195, 196, 197, 200, 201, 202, 204, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 218, 221, 222, 223, 225, 226, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244
- Non originalism*, 200
- O**
- Opini, 216, 227
- Original intent*, 199, 200, 206
- Originalisme, 200
- Otoritas Jasa Keuangan, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 164, 165, 166
- P**
- Panitia Angket, 158
- Partikelir, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195
- Pasal 22D UUD 1945, 197, 198, 205
- Pasar Modal, 154, 158, 160, 164, 234
- Patujang, 185
- Pelaksana Penempatan TKI Swasta, 173
- Pelanggaran, 157, 160, 161, 162, 163, 170, 186, 191, 193, 222, 224, 226, 231, 233, 235, 237, 238, 241, 243, 244
- Pembahasan, 159, 173, 177, 178, 179, 191, 198, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 217, 223, 228
- Pembelaan, 161, 164, 165
- Pemblokiran aliran dana terorisme, 233, 237, 239, 241, 242, 243
- Pemulihan nama baik, 242, 243
- Penafsiran doctrinal, 199
- Penafsiran etikal, 199
- Penafsiran historis, 199
- Penafsiran konstitusi, *constitutional interpretation*, 199, 200, 213
- Penafsiran prudensial, 199
- Penafsiran structural, 199, 203, 204

- Penafsiran tekstual (*textualism or literalism*), 199, 203
- Pendanaan teroris, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
- Penegakan hukum, 156, 160, 162, 166, 185, 188, 189, 190, 194, 196
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 233, 237, 238, 239, 242, 243
- Pengajuan, 163, 201, 202, 203, 210, 212, 241, 242, 243
- Pengecualian pemblokiran, 240, 243
- Pengguna jasa, 168, 169, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181
- Penyebab sengketa, 188, 190, 193
- Penyelenggaraan Penyiaran, 215, 216, 217, 219, 220, 224, 226, 227
- Penyelesaian sengketa alternative, 191, 192, 193
- Penyiaran, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
- Peradilan tata usaha Negara, 192, 195, 196, 235
- Peraturan Bersama, 211, 212
- Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013, 153, 156, 160, 162, 166
- Peraturan OJK, 153, 154, 156, 160, 161, 162, 163, 164, 166
- Peraturan Pemerintah, 155, 156, 215, 220, 221, 227, 231
- Perbankan, 157, 158, 160, 164, 234
- Perizinan, 157, 172, 185, 194, 218, 224
- Perjanjian kerja, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182
- Perjanjian penempatan, 170, 173, 174
- Perlindungan Konsumen, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167
- Perlindungan, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 223, 229, 236, 239, 240, 243, 247
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, 154, 232, 236
- Persetujuan, 157, 160, 163, 174, 175, 176, 178, 180, 181, 198, 205, 206, 207, 208, 211, 212
- Pertimbangan, 174, 179, 198, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210
- Perwakilan, 213, 214, 215, 216
- Peta pertanahan, 194
- Petita, 201
- Politik hukum, 185, 189, 218
- Presiden, 155, 156, 197, 198, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 215, 216, 224
- Program Legislasi Nasional Prolegnas, 197, 198, 201, 203, 204, 208, 209, 210, 212, 217, 233
- Program Siaran, 217, 218, 224, 226
- PPATK, 232, 233, 234, 237, 238, 241, 242, 243, 244
- PT Marba, 184, 185, 188, 189, 190, 217, 218, 224, 226
- Publik, 217, 218, 220, 222, 224, 225, 229, 242
- Putusan, 173, 174, 184, 185, 186, 188, 190, 191, 192, 194, 197, 198, 199, 201, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 220, 242
- R**
- Radiowet, 215
- Rancangan undang-undang, RUU, 197, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 215, 216, 217, 223, 225, 228
- Rapat paripurna DPR, 202, 205, 206, 209
- Regional, 168, 197, 224, 226
- Regulator Penyiaran, 220, 223, 227, 228, 229
- Rehabilitasi, 242, 243
- Represif, 186, 191, 193, 218, 219
- Responsif, 164, 186, 190, 191, 194, 218, 219, 228, 229
- RRI, 222, 225, 229
- Rule of law* (negara hukum), 231, 234, 235, 239
- RUU, 197, 198, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 215, 223, 225, 228, 229
- S**
- Sengketa, 156, 159, 164, 165, 166, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 210
- Siaran, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
- Sinkronisasi, 154, 161, 162
- Sistem Penyiaran, 217, 219, 220, 221, 229
- Strong bicameralism, 200
- Substansi, 153, 154, 156, 160, 162, 163, 164, 174, 175, 177, 178, 179, 181, 186, 210, 216, 218, 220, 221, 224, 226, 228, 233, 237
- Syarat, 154, 158, 164, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 186, 226, 235, 239
- Symmetrical/asymmetrical bicameralism*, 200
- T**
- Tanah, 167, 168, 177, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195
- Tata Tertib DPR, 201, 202, 204, 207
- Teknologi, 170, 216, 218, 223
- Tenaga Kerja Indonesia, 167, 169, 173, 175, 176, 179, 182
- Tim Pengawas, 158, 166

Tindak pidana pendanaan terorisme, 231, 232,233, 234, 241, 243, 245

Tipologi, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195

TVRI, 222, 225, 229

U

Unikameral, *unicameralism*, 200

United Nations Guidelines For Consumer Protection, 154

Usul RUU, 201, 202

UU No. 1 Tahun 1958, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 192, 195

UU No. 39 Tahun 2004, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182

UU OJK, 154, 156, 157, 159, 160, 1161, 163, 164, 165

UU PK, 154, 156, 159, 160, 162, 163, 164, 165

UU, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 198, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245

UUD 1945, 155, 156, 184, 197, 198, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 236

UUD Tahun 1945, 173, 216, 239, 240, 243

W

Weak bicameralism, 200